

TPK, TPPU DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

OLEH YUNUS HUSEIN, KETUA STHI JENTERA

JAKARTA, 9 APRIL 2019

TINDAK PIDANA KORUPSI

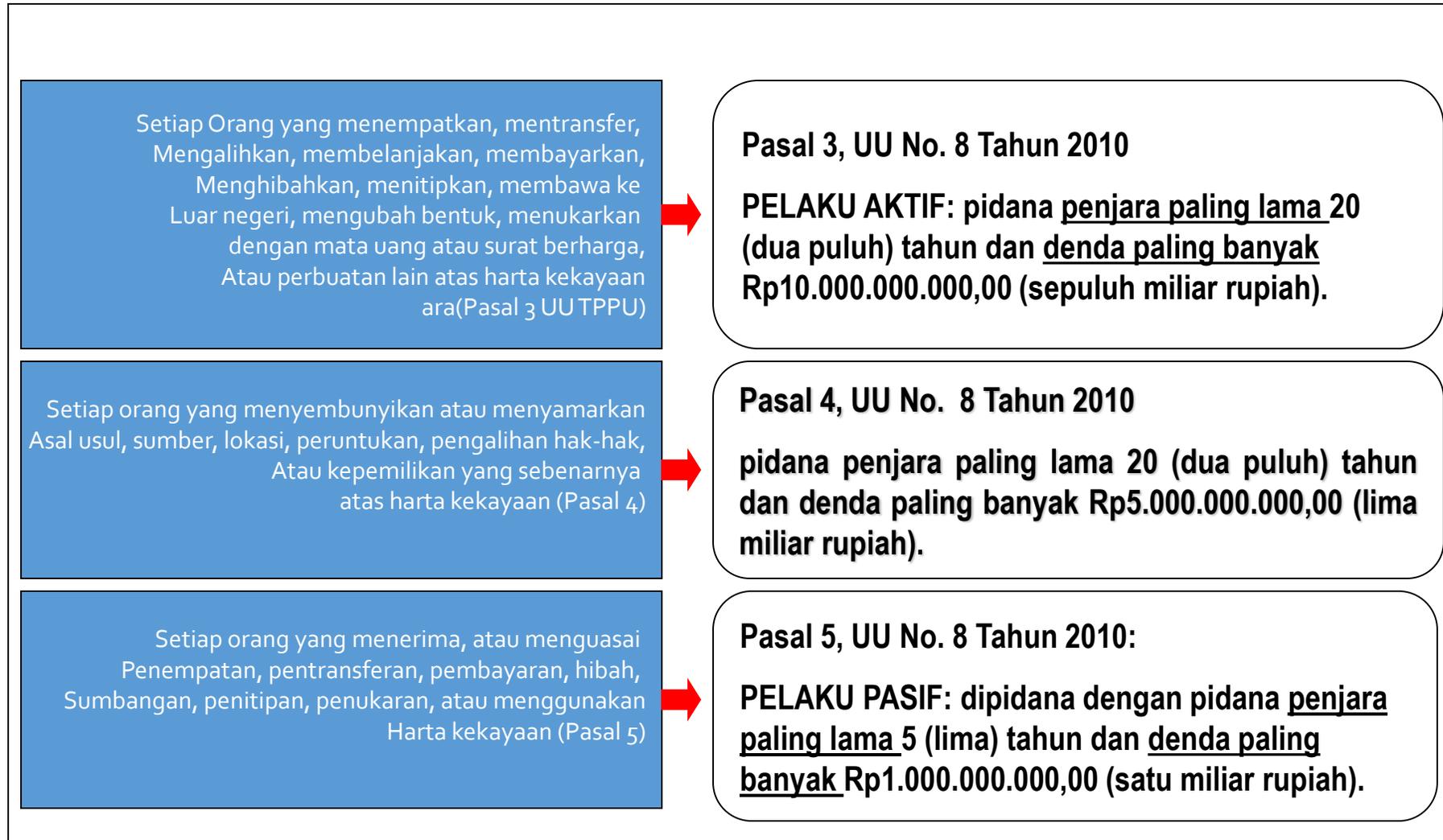
ADA 30 JENIS T.P.K YG DIKELOMPOKKAN DALAM 7 KELOMPOK:

1. MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
2. SUAP MENYUAP
3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
4. PEMERASAN
5. PERBUATAN CURANG
6. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
7. GRATIFIKASI

(UU NO. 31/1999 JO UU NO.20/2001)

MANAKAH TPK YG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORPORASI ?

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



PERBEDAAN 3 MACAM TPPU

1. PSL 3 UTK PELAKU TP ASAL (PELAKU UTAMA) YG MELAKUKAN SELF LAUNDERING DISEBUT JUGA **STAND ALONE MONEY LAUNDERING**. DG TUJUAN MENYEMBUNYIKAN DAN MENYAMARKAN ASAL-USUL HARTA KEKAYAAN YG BERASAL DARI TP ASAL.(HUKUMAN TERBERAT)
2. PASAL 4 UTK ORG LAIN (BUKAN PELAKU TP ASAL) **YG MELAKUKAN PERBUATAN : MENYEMBUNYIKAN/MENYAMARKAN ASAL-USUL, SUMBER LOKASI DLL.**HUKUMAN LBH RINGAN DR PELAKU UTAMA. DISEBUT **TIIRD PARTY MONEY LAUNDERING**. 3.
3. PSL 5 UTK ORG YG MENERIMA DAN MENGUASAI HARTA KEKAYAAN YG BERASAL DR TINDAK PIDANA TANPA TUJUAN MENYEMBUNYIKAN/MENYAMARKAN TETAPI MENIKMATI SAJA.

MANAKAH TPPU YG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORPORASI ?

PENGERTIAN KORPORASI

- **Kumpulan orang dan/atau kekayaan yg terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum**
- (UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang & UU Tindak Pidana Korupsi)

KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

1. BISA SEBAGAI PELAKU UTAMA (PSL 3 UU TPPU). MIS MENYUAP (PSL 5 UU TPK) UNTUK MEMENANGKAN TENDER, KEMUDIAN KEUNTUNGAN USAHANYA DISEMBUNYIKAN DAN DISAMARKAN, MISALNYA KONTRAKTOR MENYUAP UTK MENANG TENDER.
2. PERUSAHAAN SENGAJA DIDIRIKAN UTK MENYEMBUNYIKAN DAN MENYAMARKAN HARTA KEKAYAAN YGY BERASAL DR TPK DI L.N. (**S.P.V**) (EXPLOITING INT'L JURISDICTION ISSSUE) (PASAL 4 UU TPPU)
3. KORPORASI MENERIMA HASIL TINDAK PIDANA YG DICAMPUR DG USAHANYA YG SAH , (PSL 5)(CONCEALMENT WITHIN BUSINESS STRUCTURES)
4. PENYALAHGUNAAN PERUSAHAAN YG SAH UNTUK MENYEMBUNYIKAN DAN MENYAMARKAN HASIL TPK (MISUSE LEGITIMATE BUSINESS)

KORPORASI YG MANAKAH YG DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ?

JENIS2 TYPOLOGY TPPU

1. CONCEALMENT WITHIN BUSINESS STRUCTURES
2. MISUSE OF LEGITIMATE BUSINESS
3. USE OF FALSE IDENTITIES
4. EXPLOITING INTERNATIONAL JURISDICTION ISSUES
5. USE OF ANONYMOUS ASSET TYPES
(EGMONT GROUP, PERKUMPULAN PPAK SEDUNIA YG BERANGGOTAKAN SEKITAR 150 NEGARA).
6. TIPOLOGY LAIN2 (PERBUATAN LAIN).

1. CONCEALMENT WITHIN BUSINESS STRUCTURE (1)

MENYEMBUNYIKAN HASIL KEJAHATAN KE DALAM AKTIVITAS NORMAL DARI USAHA/PERUSAHAAN YG DIKENDALIKAN PARA KRIMINAL. UPAYA MEMINDAHKAN HASIL KEJAHATAN MELALUI FINANCIAL SYSTEM DG INTERMINGLING (MENCAMPUR) DG BISNIS YG DIKONTROL PELAKU KRIMINAL, MEMPUNYAI BEBERAPA KEUNTUNGAN:

1. MEMILIKI KONTROL YG LEBIH KUAT THD PERUSAHAAN YG DIMASUKI.
2. MENGURANGI KECURIGAAN PJK KRN TRANSAKSI TERJADI PADA REK KORPORASI BUKAN PADA REK INDIVIDU.
3. KORPORASI PUNYA ALASAN UNTUK TRANSAKSI DG BERBAGAI YURISDIKSI DAN MATA UANG, SHG MENGURANGI KECURIGAAN PJK.

CONCEALMENT WITHIN BUSINESS STRUCTURE (2)

4. KALAU YG DIMASUKI OLEH HASIL KEJAHATAN ADALAH CASH-INTENSIVE BUSINESS SEPERTI RESTAURANT, CASINO, POM BENSIN, CHAINSTORE, KECURIGAAN BANK AKAN BERKURANG.
5. HUB. ANTARA KRIMINAL DG KORPORASI DPT DISEMBUNYIKAN PADA STRUKTUR PERUSAHAAN. UNTUK REK PRIBADI BIASANYA DIMINTA INFORMASI YG SPESIFIK MENGENAI YBS.
6. BIAYA MENDIRIKAN PERUSAHAAN MUDAH DG AGENT YG TERSEBAR DI SELURUH DUNIA YG MEMUDAHKAN TERJADINYA MODUS INI.

CONTOH KASUS

1. KASUS TIPIKOR DAN TPPU ATAS NAMA NAZARUDDIN YG MENGGUNAKAN BERBAGAI PERUSAHAAN UTK MELAKUKAN TPPU.

2. MISUSE OF LEGITIMATE BUSINESS

MISUSE OF LEGITIMATE BUSINESS

1. PELAKU MENGGUNAKAN USAHA/KORPORASI YG ADA TANPA SEPENGETAHUANNYA.
2. TERUTAMA TERJADI PD NON PJK

MANFAAT MODUS INI:

1. UANG DIDUGA BERASAL DARI KORPORASI BUKAN DARI INDIVIDU
2. ADAKALANYA MEMANFAATKAN LAWYER DAN AKUNTAN.

DAMPAK: KALAU TERUNGKAP AKAN MERUSAK REPUTASI PERUSAHAAN.

CONTOH KASUS

1. PINJAMAN PEER TO PEER LENDING MELALUI PERUSAHAAN FINTECH YG PEMILIK DANA DAN PEMINJAM DANA TIDAK SALING KENAL.
2. KASUS YG DIKENAL DG NAMA CUCKO SMURFING, MISALNYA MENGIRIM DANA HASIL NARKOBA DR LN KE DN DG MENGGUNAKAN MONEY CHANGER/MONEY REMITTENCE. MENGIRIMKAN DANA HASIL KORUPSI DR LN KE DN MELALUI REKENING KBRI .

3. USE OF FALSE IDENTITIES, DOCUMENTS AND STRAW MEN

BANYAK TERJADI DI INDONESIA

USE OF FALSE IDENTITIES

1. TERKAIT DG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YG KURANG BAIK SEPERTI BELUM ADANYA SINGLE ID.
2. MENGGUNAKAN STRAWMAN YG AKAN MENGURANGI NILAI INTELLIGENCE., KRN TDK TERLIHAT HUBUNGANNYA DG ORGANISASI KRIMINAL.
3. IDENTITAS PALSU MEMUTUSKAN HUBUNGAN ANTARA PELAKU KRIMINAL DG HASIL KEJAHATAN DAN AKHIRNYA SETELAH DIPIDANA IA DPT MENIKMATI HASIL KEJAHATAN.
4. DOKUMEN PALSU DIPAKAI UTK: MELAKUKAN TINDAK PIDANA, , MENUTUPI UPAYA PENCUCIAN UANG DAN UPAYA UNTUK “MELEGALISIR” MASUKNYA DANA KE LEMBAGA KEUANGAN.

CONTOH KASUS

1. KASUS ANDH YG MENERIMA HASIL TP PERBANKAN DARI M D YG TERJADI DI CITIBANK DG MENGGUNAKAN 7 KTP YG SEBAGIAN BESAR PALSU.

4. EXPLOITATION OF INTERNATIONAL JURISDICTION ISSUE

EXPLOITATION OF INTERNATIONAL JURISDICTIONAL ISSUE

1. PELAKU TPPU MEMANFAATKAN PERBEDAAN PD BERBAGAI NEGERI MELIPUTI: KETENTUAN RAHASIA BANK, PERSYARATAN IDENTIFIKASI (SINGLE ID),, KETERBUKAAN, PERPAJAKAN, PENDIRIAN PERUSAHAAN DAN PEMBATAAN MATA UANG.
2. MAKIN BANYAK KESULITAN DAN PERBEDAAN YG ADA, MAKIN SULIT DAN TIDAK SUKSES PENEGAK HUKUM UTK MEMBUKTIKAN LINK ANTARA PELAKU DAN ASETNYA.
3. DG ADANYA GLOBALISASI TRANSAKSI DAN PRODUK PERBAANKAN MAKAIN MEMUDAHKAN BERPINDAHNYA HASIL KEJHATAN KE NEGARA LAIN DG BIAYA MURAH AKAN MEMPERSULIT DAN MEMBUAT MAHAL BIAYA PENYIDIKAN AGI PENEGAK HUKUM.

CONTOH KASUS

1. SEBAGIAN UANG HASIL KORUPSI DISIMPAN DI LN SEPERTI PD SAVE HAVEN COUNTRY SEPERTI SINGAPURA.
2. KASUS PANAMA PAPER YG MENGGUNAKAN PERUSAHAAN DI LN UNTUK MENYEMBUNYIKAN HASIL TINDAK PIDANA.

5. USE OF ANONYMOUS ASSET TYPES

USE OF ANONYMOUS ASSET TYPES

1. INI CARA MONEY LAUNDERING YG PALING SEDERHANA.
2. LESS AUDIT TRAIL, KRN ASSET INI TANPA NAMA, TANPA CATATAN, SEHINGGA MEMPERSULIT MENCARI HUBUNGAN (NEXUS) `ANTARA PELAKU DAN HASIL KEJAHATANNYA.
3. ADA ASET YG BENAR2 TANPA NAMA SEPERTI UANG TUNAI, SHG PEMILIK DAN SUMBER SEBENARNYA SULIT UTK DIBUKTIKAN KECUALI PELAKU TERTANGKAP TANGAN KETIKA IA BERINTERAKSI DG ASET HASIL KEJAHATANNYA.
4. CONTOH ASET TANPA NAMA: UANG TUNAI, BAHAN MAKANAN, JEWELLERY, PRECIOUS METAL, ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM (UNREGISTERED ELECTRONIC MONEY), FINANCIAL PRODUCT, ANONYMOUES NUMBERED PERSONAL ACCOUNT) DLL.

CONTOH

1. G.H.T YG MENYIMPAN UANGNYA DI BANK DALAM BENTUK USD, SIN DOLLAR DAN EMAS BATANGAN SENILAI SEKITAR 80 MILIAR RUPIAH.

6. OTHER TYPOLOGIES

MELAKUKAN TPPU DG TYPOLOGY LAINNYA DI LUAR YG DIURAIKAN OLEH EGMONT GROUP YG SERINGKALI DILAKUKAN DG CARA YG TIDAK LAZIM, MISALNYA MENYUAP DG KAMUFLASE DANA **C.S.R** PERUSAHAAN ATAU MENYIMPAN HASIL KEJAHATAN SECARA TIDAK WAJAR MISALNYA DISIMPAN DI LOTENG, KAMAR MANDI DAN RUANG KARAOKE KELUARGA.

PSL 3 UU NO. 10 TAHUN 2010 MELIPUTI SEMUA MODUS TPPU DG PERUMUSAN “PERBUATAN LAIN”.

DASAR/SUMBER HUKUM

1. UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NO. 8 TH 1981/KUHAP
2. UU MASING2 YG MENGATUR TP KORPORASI (PS.14 PERMA NO.13/2016)
3. UU LAIN YG MENGATUR HUKUM ACARA SEPERTI UU TTG ITE
4. PERMA NO. 13 TAHUN 2016
5. PERJA NO. 28/2014
6. UU LAIN SPT UU KEKUASAAN KEHAKIMAN, MISALNYA TTG PENGADILAN YG SEDERHANA , CEPAT DAN BIAYA RINGAN.
7. YURISPRUDENSI, MIS KEWENANGAN K.P.K DALAM MENUNTUT PERKARA TPPU.
8. PERJANJIAN INTERNASIONAL/STANDARD INTERNASIONAL MIS PENGGUNAAN TEORI IDENTIFIKASI DALAM PERKARA **C.C.L DALAM UNTOC.**

HUKUM ACARA

1. PADA UMUMNYA HUKUM ACARA UTK KORPORASI SAMA DENGAN HUKUM ACARA UNTUK PERORANGAN
2. BEBERAPA KETENTUAN DALAM KUHAP DIRUJUK DALAM PERMA, SEBAGIAN DENGAN BEBERAPA PENYESUAIAN, SEPERTI PS 12, PS 14, 18, 21 & 24 PERMA 13/2016)
3. PERMA NO. 13 TH 2016 YANG MENGISI KEKURANGAN HUKUM ACARA DAN MENYESUAIKAN HUKUM ACARA YANG ADA DALAM KUHAP.
4. DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN ANTARA HUKUM ACARA DALAM UU DENGAN ATURAN DALAM PERJA DAN PERMA, YANG BERLAKU HUKUM ACARA YANG DIATUR DALAM UU.

KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

- DI INDONESIA: Diatur di Luar KUHPIDANA
- DI BELANDA SEJAK 23 JUNI 1976 DIATUR DALAM KUHP
- DI AMERIKA SEJAK 1909 DLM KASUS NY CENTRAL & HUDSON RIVER RAILROAD VS UNITED STATES
- Korporasi Eksis & Mampu Berbuat Salah

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

- 1. PENGURUS KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUSLAH YG BERTANGGUNG JAWAB**
- 2. KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB**
- 3. KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DANJUGA SEBAGAI YG BERTANGGUNG JAWAB**

**(PROF DR MULADI, SH DAN PROF DR DWIDJA PRIYATNO, SH,MH
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, PRENADA MEDIA, JKT ED.
KETIGA,2015, HAL 86)**

AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

- **DOCTRINE OF STRICT LIABILITY**
- **DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY/RESPONDEAT SUPERIOR OR LET THE MASTER ANSWER**
- **DOCTRINE OF DELEGATION**
- **DOCTRINE OF IDENTIFICATION**
- **DOCTRINE OF AGGREGATION**

LEGISLASI DAN IMPLEMENTASI

- SEKITAR 100 UU YG MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEPERTI UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG, UU TIPIKOR, UU TPPU, UU KEPABEANAN
- PENGATURAN YG SANGAT BERAGAM MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YG BELUM JELAS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMERINTAH
- IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI MASIH MINIM (Contoh : **PT. Giri Jaladhi Wana (KALSEL) (Tipikor), PT Adei Plantation & PT Dongwoo Environmental Indonesia, PT Adei Plantation, DI PN PELALAWAN, RIAU (SDA & LH),PT NASIONAL SAGU PRIMA (PN BENGKALIS, RIAU), PT KALISTA ALAM (ACEH)**

PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001

- **PASAL: 20**
- **SUBYEK: KORPORASI DAN/PENGURUSNYA**
- **KESALAHAN: SENGAJA/DOLUS**
- **ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL**
- **SANKSI: PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN PEMBERATAN 1/3**
- **KRITERIA PENERAPAN: DILAKUKAN ORG BAIK BERDASARKAN HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN BERTINDAK DLM LINGKUNGAN KORPORASI**
- **CATATAN: PERLU DISEMPURNAKAN BERDASARKAN PENGALAMAN UNTUK KELENGKAPAN PENGATURAN..**

HUKUMAN TAMBAHAN (1)

TERGANTUNG UU YANG DIPAKAI:

UU TIPIKOR MENGENAL HUKUMAN TAMBAHAN SBB:

1. PERAMPASAN BARANG YG DIGUNAKAN/YG DIPEROLEH DARI TIPIKOR TERMASUK PERUSAHAAN MILIK TERPIDANA DIMANA TIPIKOR DILAKUKAN, BEGITU PULANG BARANG2 YANG MENGGANTIKANNYA.
2. PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
3. PENUTUPAN SELURUH ATAU SEBAGIAN PERUSAHAAN PALING LAMA SATU TAHUN.
4. PENCABUTAN SELURUH ATAU SEBAGIAN HAK-HAK TERTENTU ATAU PENGHAPUSAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KEUNTUNGAN TERTENTU YG TELAH ATAU DAPAT DIBEREIKAN PEM KEPADA TERPIDANA (PSL 18 UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG TIPIKOR).

PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1)

- **PASAL:** 6, 7, 8, DAN 9
- **SUBYEK:** KORPORASI DAN ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI
- **ACTUS REUS:** DIRUMUSKAN FORMAL
- **KESALAHAN:** DOLUS DAN CULPA
- **SANKSI:** DENDA RP. 100 MILIAR
- **HUKUMAN TAMBAHAN ADA 6**
- **ADA PENGGANTI DENDA YG TDK DIBAYAR**
- **PENGATURAN PALING LENGKAP**

PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2)

KRITERIA IMPLEMENTASI: BERSIFAT KUMULATIF BEBERAPA ALASAN, YAITU

- 1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN PERSONIL PENGENDALI KORPORASI;
- 2) DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN KORPORASI;
- 3) SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH; dan
- 4) DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KORPORAS.I

BENTUK PIDANA TERHADAP KORPORASI (UU 8/2010)

PIDANA POKOK

- DENDA PIDANA

PIDANA TAMBAHAN

- PENGUMUMAN PUTUSAN
- PEMBEKUAN KEGIATAN
- PENCABUTAN IZIN USAHA
- PEMBUBARAN DAN/ATAU
- PELARANGAN KORPORASI
- PERAMPASAN ASET KORPORASI
- PENGAMBILALIHAN KORPORASI OLEH NEGARA

INISIATIF YANG SUDAH DILAKUKAN

- Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi.”
- Poin-poin penting dalam Peraturan Jaksa Agung :
 - 1.Kriteria Pertanggungjawaban Korporasi terhadap: a. Korporasi; b. Pengurus Korporasi/ Pemberi Perintah/ Pemimpin dalam melakukan tindak pidana/ Personil Pengendali Korporasi;
 - 2.Penyelidikan dan Penyidikan
 - 3.Penuntutan
 - 4.Pelaksanaan Putusan Pengadilan
 - 5.Penanganan Harta Kekayaan/asset.

PERMA NO.13 TAHUN 2016 (1)

1. DITERBITKAN 21 DESEMBER 2016
2. MENGISI KEKOSONGAN HUKUM ACARA DAN HUKUM MATERIL (?)
3. PENERAPAN DILAKUKAN BERDASARKAN MASING2 UU YG MENGATUR PEMIDANAAN KORPORASI.
4. DITERAPKAN TERHADAP KASUS KORPORASI YANG AKAN DATANG DAN TDK DPT DITERPAKAN THD KASUS2 LAMA SEBELUM BERLAKUNYA PERMA INI.
5. SISTEMATIKA PERMA : BAB.I. KETENTUAN UMUM, BAB II. MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III.TATA CARA PENANGANAN PERKARA, BAB.IV. PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN, BAB V. KETENTUAN LAIN2, BAB V. KETENTUAN PERALIHAN DAN BAB VII. KETENTUAN PENUTUP.

PASAL 3 : PERBUATAN KORPORASI DALAM KORUPSI

1. APAKAH SUATU PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN KORPORASI ATAU BUKAN, DITENTUKAN OLEH HUBUNGAN KERJA ATAU HUBUNGAN LAIN ANTARA KORPORASI/MAJIKAN DENGAN PELAKU
2. HUBUNGAN LAIN DAPAT BERUPA HUBUNGAN KUASA DAN
3. HUBUNGAN AFILIASI

PASAL 4: KESALAHAN KORPORASI: TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH2 PENCEGAHAN

PSL. 4 AYAT 2 : STRICT LIABILITY KECUALI ADA :

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PERUSAHAAN DIKENAL DG NAMA 3 LINES OF DEFENSE (UTK TERHINDAR DARI STRICT LIABILITY).

1. ADANYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG EFEKTIF.
2. ADANYA RISK MANAJEMEN YANG BAIK (IDENTIFIKASI, MENILAI, MITIGASI DAN MEREVIEW RISIKO)., misalnya PEDOMAN THIRD PARTY PAYMENT.
3. ADANYA KEPATUHAN YG EFEKTIF, SEPERTI PAKTA INTEGRITAS DAN WHISTLE BLOWING SISTEM YANG EFEKTIF.

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. TRANSPARENCY
2. ACCOUNTABILITY
3. RESPONSIBILITY
4. INDEPENDENCY
5. FAIRNESS

EFEKTIFITAS G.C.G

1. GOVERNANCE COMMITMENT, SPT PAKTA INTEGRITAS, WIHSTLE BLOWING SYSTEM.
2. GOVERNANCE STRUCTURE, ORGAN PERUSAHAAN LENGKAP TERMASUK KOMITE2
3. GOVERNANCE PROCESS/MECHANISM ADANYA S.O.P
4. GOVERNANCE OUTCOME, SPT KEUNTUNGAN MENINGKAT DAN HARGA SAHAM DI BURSA NAIK.

UK BRIBERY ACT: ADEQUATE MEASURES

1. SECTION 7 OF THE UKBA : STRICT CORPORATE LIABILITY OFFENCE FOR FAILING TO PREVENT BRIBERY OF ASSOCIATED PERSON.
2. RUANG LINGKUPNYA LUAS.
3. PEMBUKTIAN UPAYA PENCEGAHAN BERUPA “ADEQUATE MEASURES” YG MELIPUTI:
 1. PROPORTIONATE PROCEDURES
 2. TOP-LEVEL COMMITMENT.
 3. RISK ASSESMENT
 4. DUE DILIGENCE
 5. COMMUNICATION
 6. MONITORING AND REVIEW

PEMERIKSAAN KORPORASI

1. SBG PELAKU TUNGGAL (INDIVIDU PENGURUS TDK MENJADI TERSANGKA) KORPORASI DIWAKILI OLEH PENGURUS SESUAI DG AD/ART PERUSAHAAN ATAU YG DITUNJUK PENGURUS PERUSAHAAN.
2. DLM HAL PERUSAHAAN DAN PENGURUS BERSAMA2 MENJADI TERSANGKA, KORPORASI SEDAPAT MUNGKIN DIWAKILI PENGURUS YG MENJADI TERSANGKA.
3. DALAM HAL NO. 2 TDK TERPENUHI, PENGURUS LAIN DAPAT MEWAKILI KORPORASI SESUAI DG AD/ART PERUSAHAAN/YG DITUNJUK PENGURUS KORPORASI.

PASAL 11 PEMERIKSAAN KORPORASI (2)

1. DIREKSI/PENGURUS DAPAT MENUNJUK PEGAWAI PERUSAHAAN UNTUK MEWAKILI KORPORASI.
2. **KORPORASI TIDAK DAPAT DIWAKILI PENASEHAT HUKUM. PENASEHAT HUKUM BOLEH MENDAMPINGI PENGURUS KORPORASI**

PASAL12 SURAT DAKWAAN DAN PUTUSAN ALAT BUKTI

1. SURAT DAKWAAN DAN PUTUSAN DIBUAT SESUAI DENGAN **KUHAP** DG BEBERAPA PENYESUAIAN, SEPERTI JENIS KELAMIN DLL.
2. ALAT BUKTI UTK **C.C.L** SESUAI DENGAN **KUHAP** DAN PERATURAN PERUNDANG2AN LAINNYA.
3. **KETERANGAN KORPORASI** MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH SEBAGAI PERLUASAN ALAT BUKTI DALAM KUHAP.

PENUTUP

**TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN ?**